

STRATEGI PENTAHHELIX PADA PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI

Pentahelix Strategy In Islamic Early Childhood Education

MOH FIKRI TANZIL MUTAQIN¹, TEGUH FACHMI², RATU YUSTIKA RINI³

¹PNF, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

²PIAUD, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Indonesia

³PG-PAUD, Universitas Bina Bangsa, Indonesia

Email: netfikri8@gmail.com, teguh.fachmi@gmail.com, ratu.yustika.rini@binabangsa.ac.id

Manuskrip diterima: [13/11/2022]. Manuskrip disetujui: [29/12/2022]

Abstrak: Berbagai tantangan dan problematika terus menghampiri pada setiap unsur kehidupan, termasuk dalam ranah pendidikan. Dalam ranah pendidikan khususnya yang menangani anak usia dini dihadapkan dengan tantangan yang besar seperti persoalan stunting, model pembelajaran inovatif, pemerataan pendidikan rural dan urban, pemerataan kesejahteraan pendidik. Juga disisi lain peserta didik pada jenjang pendidikan pra sekolah ini sedang menghadapi tugas perkembangan yang singkat dan pada masa *golden age*. Problem dan tantangan yang hadir secara bersamaan perlu penanganan serius dari berbagai unsur termasuk dalam konteks pendidikan islam anak usia dini. Artikel ini mengupas strategi pentahelix pada pendidikan islam anak usia dini dengan *systematic review* yang mengolah data dari berbagai hasil penelitian, jurnal dan dokumen tertulis lainnya terkait penyelenggaraan pendidikan islam anak usia dini di seluruh Indonesia. Hasil analisis menyajikan gagasan strategi pentahelix dalam implementasi pendidikan islam anak usia dini. Terdapat lima unsur dalam strategi pentahelix diantaranya pemerintah, akademisi, dunia industri, masyarakat, dan media masa. Pemerintah dengan tugas membuat dan melaksanakan kebijakan secara konvergen, akademisi melakukan penelitian berdasarkan pokok masalah, dunia industri support akan kebutuhan material, masyarakat yang terlibat sebagai pelaksana, dan media masa dengan upaya membangun konstruksi literasi kepada khalayak umum.

Kata Kunci: Pentahelix, Pendidikan Islam Anak Usia Dini.

Pentahelix Strategy In Islamic Early Childhood Education

Abstract: Various challenges and problems continue to approach every element of life, including in the realm of education. In the realm of education, especially those handling early childhood faced great challenges such as stunting problems, innovative learning models, distribution of rural and urban education, and equitable distribution of educators. Also on the other hand students at the pre-school education level are facing a short development task during the Golden Age. Problems and challenges that are present simultaneously need serious handling from various elements including in the context of Islamic education early childhood. This article explores the Pentahelix strategy in Early Childhood Islamic Education with Systematic Reviews that process data from various research results, journals and other written documents related to the implementation of early childhood Islamic education throughout Indonesia. The results of the analysis present the idea of the Pentahelix strategy in the implementation of early childhood Islamic education. There are five elements in the pentahelix strategy including the government, academics, the industrial world, the community, and the mass media. The government with the task of making and implementing convergent policies, Akademi conducts research based on the subject matter, the industrial world supports material needs, the community involved as implementers, and the mass media by building literacy construction to the general public.

Keyword: Pentahelix, Islamic Early Childhood Education

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi strategi terstruktur untuk menjamin produktivitas sumber daya manusia di masa depan. Berbagai orientasi dihadapkannya pendidikan di semua berbagai negara selalu mengarah pada pencapaian-pencapaian seperti optimalnya tugas perkembangan manusia, menjadi pribadi yang mandiri, juga serta menjadi manusia yang merdeka dikemudian hari. Pendidikan juga disiapkan secara terencana untuk memberikan hak dan pelayanan kepada anak sehingga mereka saat menjadi dewasa akan memiliki keterampilan hasil dari proses pendidikan. Alasan tersebut yang menjadikan setiap negara seolah-olah berlomba membuat sistem pendidikan yang unggul. Proses tersebut tentunya dipersiapkan dari berbagai jenjang dan satuan pendidikan. Pendidikan pra sekolah menjadi salah satu jenjang pendidikan awal yang ditempuh oleh anak sebelum beranjak remaja, dimana didalamnya terdapat proses penanaman nilai-nilai baik melalui belajar dan bermain.

Fakta lain yang diterima oleh banyak pihak bahwa masa perkembangan usia anak usia dini merupakan masa emas (*golden age*). Dengan demikian berbagai pihak berupaya untuk memberikan dukungan terhadap kualitas pelaksanaan pra sekolah. Indonesia memiliki karakteristik yang beragam dalam penyelenggaraan pendidikan pra sekolah baik yang berstatus negeri dan swasta, pada sekolah yang negeri juga terbagi dalam dua pengelolaan kementerian yaitu Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Pendidikan pra sekolah pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan memiliki istilah seperti PAUD, TK atau Kober. Sedangkan pada Kementerian Agama biasanya disebut Raudhatul Athfal (RA). Literatur ini akan spesifik membahas dalam konteks pendidikan pra sekolah yang dibawah kebijakan Kementerian Agama yaitu Raudhatul Athfal (RA). Berdasarkan data pada Kementerian Agama RI yang dihimpun pada pangkalan data EMIS terdapat sebanyak 29.842 lembaga RA, akan tetapi tidak ada satupun lembaga yang bertatus Negeri. Disisi lain yang perlu dijadikan perhatian adalah persepektif umum mengenai tanggung jawab pelaksanaan pendidikan pra sekolah masih bertumpu pada peran guru. Seperti yang dikatakan dalam Hidayatullah (2021) bahwa orang memiliki paradigma bahwa kualitas pendidikan adalah poin yang penting seperti kualitas pelayanan (kepuasan siswa dan kepuasan wali murid) yang diberikan oleh pendidik. Padahal jika orientasinya untuk masa depan kehidupan manusia seharusnya tanggung jawab pendidikan tidak hanya bertumpu pada satu pihak atau lembaga.

Seiring berkembangnya teknologi dan kesadaran masyarakat seharusnya pendidikan menjadi konsep kesatuan sehingga dengan sendirinya mengikat berbagai pihak yang memiliki kepedulian, kemudian membentuk mata rantai yang tidak terputus. Setidaknya saat ini gerakan-gerakan sosial dan kerelawanan dalam mendukung proses pembelajaran, penerapan model terbaru, serta memfasilitasi teknologi pembelajaran sudah sangat eksis selama satu dekade terakhir. Berbagai praktik baik juga telah dilakukan oleh pihak-pihak eksternal dalam mendorong pembaharuan gaya mengajar, terciptanya kesadaran fundraising untuk pendidikan kawasan terpencil serta dukungan sekolah di wilayah masyarakat terbelakang secara sosial ekonomi. Meskipun disisi lain masih jenjang pendidikan pra sekolah masih ditemukan problematika yang perlu ditangani secara serius. Berbagai fakta kehadiran satuan pendidikan pra sekolah dengan kuantitas banyak belum berimbang dengan kualitas yang dimiliki, baik dari segi pembelajaran, pembiayaan, fasilitas utama, manajerial, dan pelaksanaan pendidikan orang tua yang belum maksimal. Disebutkan dalam Salman & Widodo, (2020) bahwa hal itu merupakan dampak dari regulasi kebijakan yang tidak diperhatikan secara maksimal khususnya pada Raudhatul Athfal (RA). Selain itu kita dihadapkan pada perosalan sebagian orang tua yang bersikap apatis dalam melakukan bimbingan belajar dalam perkembangan moral spritual anak, dengan alasan sibuk pekerjaan rumah tangga (Habsah et al., 2021).

Bahkan fakta lain mengenai prevalesi stunting Indonesia yang cukup tinggi diantara negara-negara lain, 2018 Inonesia menunjukkan value 30,8 The World Bank (2022), akan tetapi Indonesia dalam 2 tahun berhasil menurunkan sampai dengan 24,4 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Dengan demikian kehadiran pendidikan pra sekolah juga harus menjadi agen konservatif sumber daya manusia (SDM) untuk bisa menghadapi era masa mendatang tanpa adanya hambatan karena permasalahan stunting. Melihat fakta tantangan dan permasalahan yang berada dalam ruang lingkup pendidikan pra sekolah maka dianggap penting strategi yang dapat dijalankan untuk menjawab permasalahan dan memberikan pelayanan kepada penerima manfaat.

Dalam hal ini pengelolaan kelembagaan juga dapat menggunakan pendekatan-pendekatan yang multidisiplin dan multiprofesi. Meskipun dalam berbagai konsep penyelenggaraan pendidikan sudah memunculkan perlunya sentra-sentra yang saling berkaitan, seperti Ki Hadjar Dewantara yang telah memetakan Tri Sentra Pendidikan sebagai kekuatan utama dalam mengembangkan SDM yang mandiri dan potensial di masa depan (Tilaar & Dwijowijoto, 2008). Bahkan ekosistem pendidikan menjadi istilah yang sering digunakan untuk membangun kerjasama yang fungsional dan berkenajutan. Spesifik dalam konteks PAUD terdapat konsep HI (Holistik Integratif), namun demikian pada praktiknya masih jauh dari hakikat integratif.

Alternatif strategi yang dapat digunakan yaitu strategi pentahelix yang mewajibkan lima unsur utama yang berperan, dimulai dari akademisi, praktisi, perusahaan, media, dan NGO atau masyarakat umum. Strategi ini dapat membuat efektif karena kelima unsur tersebut memiliki disiplin ilmu dan profesi yang berbeda serta kecil

kemungkinan satu disiplin mengerjakan disiplin lain secara bersamaan. Sehingga menggabungkan ke lima unsur tersebut merupakan usaha membangun kekuatan besar dalam pengelolaan program. Dalam konteks pendidikan, seharusnya bisa melaksanakan pendidikan dengan strategi pentahelix sehingga, pengelola satuan pendidikan dapat fokus terhadap proses pembelajaran. Pada artikel ini membahas tentang rasional strategi pentahelix untuk dapat diterapkan dalam pengelolaan satuan Pendidikan Anak Usia Dini mengingat permasalahan yang muncul dari situasi pengelolaan pendidikan islam anak usia dini di Indonesia atau Raudhatul Athfal (RA) yang memerlukan kerja multidisiplin dan multiprofesi.

LITERATUR REVIEW

Pentahelix sebagai pendekatan

Konteks pelaksanaan pendidikan di Indonesia kental dengan nilai-nilai positif yang diturunkan oleh Ki Hadjar Dewantara, dimana dalam pendekatan yang diperkenalkan menitikberatkan pada proses pendidikan yang berkesinambungan dan terikat. Tidak hanya sekolah dan guru didalamnya yang bertanggungjawab dalam mengelola pendidikan serta mengembangkan potensi peserta didik, akan tetapi peran serta masyarakat dan keluarga. Hal itu yang dinamakan oleh Ki Hadjar Dewantara sebagai Tri Sentra Pendidikan, Indonesia mengenal ekosistem tersebut sudah Ki Hadjar Dewantara mendirikan Taman Siswa. Dalam peranannya ketiga unsur tersebut cukup berbeda, namun demikian ketiga unsur tersebut merupakan penopang utama dalam proses pendidikan guru yang berperan sebagai orang yang memberikan stimulus perkembangan peserta didik di sekolah, keluarga sebagai unsur sosial terkecil yang menjadi social support anak, serta masyarakat yang memberikan dukungan untuk pembelajaran lingkungan serta menyeimbangkan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Literatur lain mengemukakan bahwa anak tidak hanya melakukan pembelajaran di sekolah akan tetapi penanaman nilai-nilai keseharian dalam keluarga dan masyarakat perlu dilakukan stimulus sehingga jasmani dan rohani anak terpenuhi dengan baik (Suparlan, 2016). Perkembangan dunia pendidikan semakin hari menunjukkan berbagai progres ke arah positif, hal itu terbukti dari penerapan-penerapan strategi pengelolaan pendidikan yang melibatkan banyak pihak. Seperti halnya konsep pentahelix yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan, meskipun demikian konsep tersebut belum populer dalam pengelolaan pendidikan. Di Indonesia mengenal konsep tersebut umumnya populer dalam menopang kegiatan industri, percepatan ekonomi, dan penanganan bencana.

Konsep pentahelix bekerja sebagai satu kesatuan yang saling mengikat, dimana konsep ini berkembang setelah sebelumnya terbentuk konsep triple helix dan quad helix. Triple helix menjadi sebuah hubungan kerja yang saling mengikat antara universitas, pemerintah, dan dunia industri, meskipun memiliki peranan yang berbeda ketiganya akan tetapi merupakan penopang utama dalam pengembangan inovasi (Etzkowitz, 2008). Selain itu dalam konsep triplehelix memungkinkan hubungan yang terjadi secara triateral (pemerintah-akademisi-industri) dibandingkan dengan bilateral. Disisi lain pergerakan helix ketiganya yang dilakukan secara bersamaan dapat memunculkan konflik kepentingan yang disebabkan oleh kedekatan antar unsur. Selanjutnya konsep Triple Helix dikembangkan menjadi Quadruple Helix dengan penambahan Media sebagai 4th helix kemudian dikembangkan lagi menjadi Penta (Quintuple) Helix yang melibatkan komunikasi sosial dalam pergerakan Keberhasilan konsep pentahelix dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dan penanganan bencana sudah banyak dilakukan. Seperti yang dikatakan dalam penelitian (Sutrisno & Anitasaro, 2019) pergerakan ekonomi ditopang dari berbagai unsur dalam konsep pentahelix, meski terdapat unsur yang paling berpengaruh yaitu pelaku bisnis dan pemerintah hadir dalam membuat regulasi antara stakeholder. Kehadiran lima unsur tersebut, merupakan wujud proses yang melibatkan kekuatan besar dan potensi yang dapat menutupi kekurangan pada masing-masing sektor. Meskipun demikian, hal ini akan terjadi *conflict of interest* ketika pelaksanaan dari sebuah proyek bersentuhan dengan kepentingan sepihak secara sistematis. Dimana celah kecurangan akan terjadi jika proses tersebut dimobilisasi secara sistemik. Ketika fenomena tersebut terjadi atau menunjukkan gejala terjadinya kecurangan, maka terdapat peran-peran *cross control* yang dilakukan antar unsur.

Dalam penyelenggaraan Pendidikan tentu memerlukan strategi dan inovasi pendekatan, termasuk pada pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pentahelix kemudian menjadi pendekatan yang bisa digunakan dalam menjalankan program-program. Berikut dijelaskan peranan penting dari setiap unsur yang ada dalam konsep pentahelix, baik akademisi, pemerintah, industri, media, dan masyarakat. Peranan tersebut dikerucutkan dalam sebuah tema dimana akademisi menjadi satu titik keberangkatan dalam penelitian dan pengembangan model-model pelaksanaan PAUD. Pemerintah menjadi regulatif dalam pemerataan tugas dan fungsi setiap unsur dalam pentahelix. Kesadaran dunia Industri menjadi penopang sumber komplemen anggaran dan program yang dapat dilakukan melalui program berkelanjutan atau yang dikenal dengan CSR (Corporate Social Responsibility). Masyarakat yang menjadi dukungan sosial yang terdekat dari satuan pendidikan. Serta literasi digital dan literasi positif untuk membangun citra dan menyebarkan praktik baik pelaksanaan pendidikan.

METODOLOGI

Artikel ini merupakan *systematic review* yang mengolah data dari berbagai hasil penelitian, jurnal dan dokumen tertulis lainnya terkait penyelenggaraan pendidikan islam anak usia dini di seluruh Indonesia. Data pada artikel

ini menggunakan sumber secondary data, dimana secara umum menganalisa bukti, rekaman, dan laporan historis yang sudah dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan (Moeloleng,2014). Adapun teknik dalam pengumpulan data menggunakan empat tahapan diantaranya Studi Literatur, Dokumentasi, Diskusi, dan Inisiatif subjektif. Studi literatur digunakan sebagai bagian aktifitas mencari data yang menggunakan literatur dari sumber-sumber yang relevan dianalisa dan di proses sebagai material riset. Tahapan studi dokumentasi dilakukan secara bertahap dimulai penulisan artikel berlangsung, untuk kemudian penulis melakukan identifikasi data yang relevan dengan sumber dokumen terkait. Diskusi menjadi salah satu pengumpulan data dengan menuangkan berbagai ide dari orang-orang ahli mengenai subjek dan isu terkait pada artikel ini. Tahapan terakhir yaitu Intuitif subjektif mengutarakan pemikiran penulis dan opini terhadap isu yang sedang didiskusikan serta mengutarakan gagasan strategi pentahelix dalam implementasi pendidikan islam anak usia dini.

RESULT

Keberangkatan Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan merupakan titik keberangkatan dalam merumuskan keputusan, kebijakan, maupun peraturan. Dimana proses tersebut dilakukan berdasarkan data empirik yang berlaku dari setiap fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dunia akademik berperan dalam bidang kajian dan pengembangan berdasarkan hasil serangkaian penelitian sehingga dapat dijadikan draft regulasi kebijakan atau perencanaan program (Afandi et al., 2022). Penelitian disediakan dengan cara dan kaidah ilmiah, agar hasil dari penelitian di dunia akademik tersebut memiliki nilai objektivitas yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan untuk pengambilan keputusan strategis di level pemerintah. Proses itu tentunya dilakukan merujuk pada konsepsi tri dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), dimana ketiganya menjadi tugas dan fungsi insan akademis.

Dalam perjalanannya akademisi akan selalu memerhatikan fungsi-fungsi epistemologis aksiologis, ontologis, yang bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bermanfaat berdasarkan kaidah-kaidah dan fungsi dari objek penelitian. Agar kemudian pemangku kebijakan menggunakan hasil kajian dari perguruan tinggi, sehingga menghemat waktu dan pekerjaan dalam bidang pra-kebijakan. Meskipun demikian saat ini tidak hanya perguruan tinggi yang menggunakan pemodelan penelitian dan pengembangan dalam menentukan kebijakan pasar. Pada umumnya telah berkembang divisi-divisi Research and Development pada dunia industri. Seperti yang dikemukakan dalam literatur bahwa dalam waktu yang sama dunia industri juga membentuk riset senter untuk membangun lingkungan yang ramah akan kebutuhan industri (Amrial et al., 2017). Akan terbentuk jalan yang tepat ketika proses penentuan kebijakan berdasarkan penelitian-penelitian dan pengembangan baik yang bersifat terbatas maupun luas, agar kemudian berbagai manfaat dapat diterima oleh praktisi pendidikan.

Banyak riset dan bukti yang mendukung untuk dijadikan bahan rujukan praktisi pendidikan dalam menyelenggarakan proses pendidikan di satuan masing-masing. Selama ini konseptualisasi teori-teori terbaru yang didasari oleh penelitian tidak banyak digunakan dalam praktik persekolahan. Sehingga tidak terjadi equilibrium antara praktik dan teori. Padahal penelitian-penelitian telah menyediakan elaborasi dari berbagai teori yang hadir, uji coba empirik, dilakukan secara terstruktur, menggunakan responden yang relevan, juga dilakukan pengolahan.

Akan tetapi kajian di meja akademik sekalipun bersifat longitudinal tidak terserap secara maksimal pada level implementasi praktik di satuan pendidikan. Semestinya satuan pendidikan memerhatikan hasil riset terbaru dan relevan dengan kondisi permasalahan masing-masing. Terlebih lagi jika satuan pendidikan tidak memiliki departemen atau bidang yang menanungi riset and development.

Penelitian terbaru pada konteks Anak Usia Dini telah banyak dilakukan seperti dalam ranah perkembangan anak, iklim belajar, etnopedagogik, etnoparenting, kualitas pendidik, school well-being dan lain sebagainya (Fachmi et al., 2019; Nurlatifah et al., 2020; Rachmawati, 2020; Sandseter & Seland, 2016). Sehingga dalam hal ini pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi memungkinkan dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan pendidikan diberbagai tingkatan baik makro maupun mikro. Untuk itu, setiap kebijakan pendidikan perlu mempertimbangkan hasil penelitian yang sudah digunakan juga disisi lain sebagai seorang pendidik dan tenaga kependidikan diharuskan memiliki kepekaan terhadap hasil-hasil riset terbaru. Maka dengan adanya kesadaran guru terhadap riset-riset terbaru akan membantu dalam melaksanakan berbagai metode terbaru, melakukan manajerial pendidikan dengan efektif dan efisien, sampai dengan peka terhadap pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan perubahan zaman.

Saat ini masih didapati pola kerja guru dengan ragam tatangan dari mulai tantangan pengelolaan administratif sampai dengan pengajaran. Lebih dari itu guru perlu beradaptasi dengan karakteristik pendidikan di abad-21 (Husain & Kaharu, 2020). Berikut juga dengan tugas-tugas tambahan yang dibebankan, sehingga waktu untuk menyerap informasi hasil riset tidak optimal atau bahkan riset yang ditulis tidak informatif dan mudah digunakan oleh pembaca. Dengan kata lain, peneliti yang akan bekerja menggunakan strategi pentahelix dan berorientasi pada penerima manfaat maka memerlukan keterampilan dalam menyampaikan bahasa riset dengan kata yang lugas dan *user friendly*. Atau bahkan untuk membangun kesadaran guru terhadap riset-riset terkini

diperlukan tenaga pendamping atau dalam konteks komunikasi abad-21 disebut dengan *influencer*. Hal tersebut berfungsi untuk meningkatkan implikasi sasaran yang lebih luas (Carpenter et al., 2021). Sehingga seorang tenaga pendamping dapat menyampaikan dan memengaruhi cara kerja pendidikan yang didasari hasil-hasil riset di level akademik secara mudah. Dimna fungsi riset yang dipublikasikan sebagai bentuk media komunikasi temuan-temuan peneliti kepada penerima manfaat riset. Serta agenda penelitian dan pengembangan yang akan menginformasikan dan mendorong perubahan yang diperlukan (Donovan et al., 1999).

Konvergensi Kebijakan

Kompleksitas persoalan yang mengemuka di satuan Pendidikan Anak Usia Dini penting untuk dilakukan pemetaan penyelesaian secara berkesinambungan dan terpusat. Banyak persoalan yang ditemui seperti inovasi pedagogik, sumber daya manusia pendidik yang masih minim, sarana prasarana yang belum maksimal, hingga persoalan stunting yang masih tinggi. Problematika tersebut memerlukan kebijakan lintas lembaga, sehingga tidak tumpang tindih atau bahkan terdapat kebijakan yang terlewat. Pemerintah yang menganut sistem Demokrasi menjadi pengatur regulasi kebijakan baik itu dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Selain itu dalam pelaksanaan kebijakan diperlukan keadaan yang saling mendukung dalam konteks micro maupun makro. Bahkan keadaan yang tidak memiliki oposisi memiliki peranan yang sama untuk menjadi penyeimbang substansial.

Pelaksanaan pembelajaran di PAUD tidak hanya tanggung jawab dibawah kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akan tetapi kementerian lain yang menyangkut keberlangsungan manajerial, kualitas sarana pasarana, pendanaan juga hal lainnya. Bahkan secara level juga bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, mengingat pemerintahan di Indonesia menggunakan sistem desentralisasi dimana sistem ini pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan pemerintahan. Meskipun demikian (Arwildayanto et al., 2018) mengatakan bahwa implikasi dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi masih belum begitu jelas, seperti halnya kebijakan kurikulum yang masih secara terpusat di level sentral. Jika melihat konsepnya sistem desentralisasi seharusnya kebijakan yang berlaku di sekolah dapat dibebankan tanggung jawabnya kepada masing-masing satuan pendidikan. Sehingga dalam literatur yang sama, dikatakan terdapat permasalahan yang mungkin terjadi bahwa tarik menarik antara otonomi kebijakan pendidikan di tingkat daerah, pusat, juga satuan pendidikan (Arwildayanto et al., 2018). Dengan demikian konsep konvergen merupakan bagian upaya untuk melakukan integrasi kebijakan, sehingga diperlukannya identifikasi yang menyeluruh dari tingkatan yang paling bawah. Seperti halnya dalam konteks Indonesia yang menekankan kebijakan secara konvergen untuk penanganan stunting. Konvergen dalam perspektif kebijakan Indonesia dikatakan Konvergensi merupakan pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama (TP2AK, 2020).

Konsep pentahelix yang melibatkan pemerintah bukan hanya sekedar menempatkan kebijakan, akan tetapi sebagai katalisator dan regulator dalam pelaksanaan program. Dalam hal ini pemerintah bekerja untuk berbagai lapisan masyarakat, terutama negara dengan karakteristik heterogen, multietnis, dan wilayah demografik yang berbeda-beda. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebar secara luas di negara Indonesia, hal itu tidak terlepas dari kondisi geografis, topologi, demografis, sosial, budaya, dan adat.

Sehingga kebijakan perlu melihat berbagai kondisi tersebut, terutama dalam level sentral. Juga implementasi kebijakan perlu merata untuk berbagai situasi. Masih dijumpainya potret PAUD yang berjalan secara tidak seimbang antara kebijakan dan realita. Seperti halnya potret pelaksanaan PAUD di salah satu Dusun yang masih belum merasakan kehadiran kebijakan pemerintah baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi (Ndeot, 2020). Dalam sebuah konsep tripelhelix sebelum terbentuknya pentahelix juga mempertegas tentang fungsi pemerintah yang seharusnya ketika memberlakukan kebijakan perlu memerhatikan variasi-variasi kewilayahan misalnya karakteristik metropolitan, urban, sub urban, dan rural (Leydesdorff & Etkowitz, 2015). Setelah lahirnya kebijakan, pemerintah juga berperan dalam melakukan monitoring sehingga terlaksananya fungsi-fungsi bekerja secara optimal (Amrial et al., 2017).

Suatu kebijakan tentunya hadir dari multi fenomena di lingkungan sosial sehingga diperlukan satu aturan tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian kebijakan tidak bisa lahir tanpa fenomena sedangkan fenomena tidak akan pernah menjadi solusi ketika tidak dilakukannya identifikasi lingkungan sosial berikut dengan kebutuhannya. Untuk itu orang-orang yang ditugaskan oleh publik harus memiliki kepekaan terhadap permasalahan yang terjadi di Pendidikan Anak Usia Dini. Mereka terlebih dahulu dapat melakukan identifikasi secara berkala dengan menyusun skala permasalahan atau juga dapat menggunakan Analisis Pemecahan Masalah Secara Hierarki. Agar kemudian permasalahan yang ditangani dapat terpetakan dengan baik secara desentralisasi.

Pelaksanaan identifikasi permasalahan di satuan Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu upaya untuk menempatkan publik ditengah hadirnya kebijakan. Masyarakat penting untuk hadir dan terlibat, dengan tidak dilibatkannya masyarakat akan berdampak pada kebijakan yang tidak pro terhadap isu sosial dan menyentuh langsung pada penerima manfaat. Hal itu juga diingatkan dalam literatur Salman & Widodo (2020) dan (Amrial et al., 2017) bahwa dengan tidak terlibatnya masyarakat dalam penyusunan kebijakan memiliki risiko kebijakan yang tidak mengakomodir peningkatan mutu sekolah khususnya pada Raudhatul Athfal (RA). Pada sisi lain yang diharapkan adalah upaya perumusan kebijakan pemerintah perlu memerhatikan masa waktu,

dimana Sylvina (2014) menyatakan bahwa rumusan kebijakan harus berada di awal periode, sehingga tidak menimbulkan limitasi komunikasi antara pemerintah dan pelaksana kebijakan.

Kesadaran Dunia Industri (Industri)

Perananan dunia industri dalam dunia pendidikan tidak bisa lepas untuk mendorong yang berasal sumber eksternal. Saat ini sangat disadari pendidikan berjalan secara mayoritas menggunakan sumber-sumber pendanaan pemerintah, dimana sumber yang tersedia tidak dapat memenuhi kompleksitas peengelolaan pendidikan. Alokasi pemerintah yang diamanatkan dalam konstitusi hanya sebanyak 20% untuk anggaran pendidikan, dimana hal itu mengikuti pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) negara setiap tahunnya. Alokasi tersebut perlu diberlakukan kelipatan sehingga penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan secara merdeka. Berbagai keperluan dalam mendukung pendidikan bukan hanya peruntukan proses pembelajaran, pengembangan fasilitas pendidikan dan peningkatan kualitas pendidik saja. Terdapat permasalahan yang tidak nampak di permukaan, akan tetapi sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan. Seperti halnya isu stunting yang semakin disoroti oleh pemerintah juga dunia, dimana Indonesia memiliki angka stunting yang cukup tinggi. Berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 bahwa prevalensi stunting berada pada 24,4% (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

Dapat dikatakan bahwa problem tersebut memerlukan dukungan keuangan satuan yang stabil, program yang mengarah pada permasalahan, dan sumber daya manusia yang mendukung. Perusahaan atau dunia industri memiliki kekuatan untuk memberikan suplemen terhadap penyelesaian problem tersebut. Selain itu dengan hadirnya dunia industri berimplikasi banyak terhadap perkembangan sumber daya manusia satu negara. Kehadiran program berkelanjutan atau yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kebermanfaatannya dapat dialokasikan terhadap kasus-kasus prioritas. Dengan kepedulian dunia industri terhadap pendidikan berpeluang menambah kekuatan yang bersumber dari luar satuan pendidikan (ekstrinsik), disamping pengelola pendidikan itu sendiri (intrinsik) menguatkan perannya. Bahkan disisi lain dunia industri perlu menyiapkan pendanaan yang cukup untuk kebutuhan riset-riset produktif dan prioritas yang dikelola oleh perguruan tinggi, untuk kemudian diregulasi oleh pemerintah. Terlepas manfaat dari kehadiran industri di sebuah negara seperti penurunan pengangguran dan pendapatan negara, juga lebih penting berdampak pada inovasi pemecahan masalah seperti stunting. Mengacu pada kajian (Kimatu, 2016) bahwa kehadiran hubungan industri dengan pemerintah akan membuka peluang pekerjaan baru juga pendapatn pajak, sedangkan hubungan indusri dengan akademik akan menciptakan produk baru dan inovasi. Dengan demikian dunia industri memiliki peranan strategis.

Dukungan Sosial (Masyarakat)

Lapisan berikutnya adalah unsur masyarakat yang perlu memiliki kesadaran merata mengenai pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini. Indonesia dengan kakteristik negara berkembang masih minim akan kesadaran orang tua dan masyarakat tentang pendidikan pra sekolah. Bahkan dalam laporan yang dipublikasikan dalam (Tan, 2016) di Indonesia memiliki karakteristik keberadaan PAUD yang rendah, dimana kondisi tersebut disebabkan kurangnya kesadaran publik atau masyarakat juga kurangnya minat yang kuat. Kemajuan pendidikan perlu didukung dengan konsistensi ekosistem pendidikan. Ki Hadjar Dewantara mengenalkan tri sentra pendidikan yang merupakan pondasi dari kehidupan sekolah dan pendidikan, yang didalamnya terdapat unsur masyarakat (Suparlan, 2016). Hal ini kemudian yang sebelumnya disebut oleh sosiolog Prancis Emile Durkheim sebagai kesadaran kolektif. Perlunya dibangun kesadaran kolektif untuk mendukung tujuan yang telah ditentukan. Bahkan dalam literatur lain dikatakan bahwa untuk mengawali baik proses maupun produk dapat dimulai dari masyarakat yang sadar dan kreatif sejalan dengan inovasi nasional (Kimatu, 2016).

Literasi Positif (Media)

Banyak program pendidikan dengan konsep baik telah terlenegara namun tidak diketahui oleh masyarakat luas. Hal itu dikarenakan kurangnya kesadaran penyelenggara program akan publikasi media masa. Meskipun demikian hal itu bukanlah problematika utama dalam aspek publikasi kepada masyarakat, akan tetapi bagaimana konsumsi bacaan masyarakat sudah berada pada level literasi positif. Untuk itu pernanan media masa untuk memberikan informasi kepada masyarakat juga perlu memberikan informasi yang akurat dan sesuai dengan bukti yang ada. Dengan kata lain, ketika penyelenggaraan pendidikan memiliki nilai baik maka sudah seharusnya dipublikasikan nilai baik sesuai dengan fakta yang ada bukan mempublikasikan informasi yang sebaliknya sehingga memicu hoax. Sebagaimana telah disebutkan bahwa media masa prinsipnya memberikan bantuan kepada masyarakat, dunia akademik, pemerintah dan industri untuk mempromosikan berbagai aktivitasnya (Shyafary et al., 2021).

Meskipun demikian, ketika terdapat penyelenggaraan pendidikan dengan nilai kekurangannya media juga berperan memberikan sumber informasi kepada masyarakat sesuai dengan fakta. Agar kemudian data dan fakta yang didapati oleh kacamata media tersebut dapat dijadikan sebagai bahan analisa masyarakat. Penilaian objektif masyarakat juga diperlukan dalam konteks ini, agar tidak menimbulkan reaksi emosi hanya karena ketidaksukaan terhadap penyelenggara pendidikan. Hal ini kemudian menyebabkan hoax menyebarluas dengan cepat.

KESIMPULAN

Pentahelix menjadi satu strategi yang dapat ditindaklanjuti, sehingga keberhasilan pada strategi ini adalah dengan cara melakukannya melalui komitmen bersama. Pemerintah dapat mengawasi terbentuknya lingkaran kerjasama yang saling mengikat. Setiap unsur juga perlu mulai menyadari bahwa penyelesaian masalah-masalah pokok pada ranah anak usia dini dan Satuan Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat dapat memulai membuka kesadaran bahwa anak merupakan aset berharga yang perlu dijaga dari berbagai masalah seperti stunting atau loose learning karena masa transisi pembelajaran. Juga pola pikir yang mengenai hak dan perlindungan anak untuk tetap dijaga komitmennya secara bersama. Akademisi dapat memulai kajian-kajian ilmiah dari problem kesadaran masyarakat sampai dengan kemampuan penanganan masalah oleh civil society. Juga media yang membangun literasi positif serta menyebarkan informasi-informasi penting kepada penerima manfaat (masyarakat)

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M., Anomsari, E., Novira, A., & Sudartini, S. (2022). *A Penta-Helix Approach to Collaborative Governance of Stunting Intervention In West Java Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315238>
- Amrial, A., Muhamad, E., & Adrian, A. M. (2017). Penta helix model : A sustainable development solution through the industrial sector. *Social and Human Science*, November.
- Arwildayanto, Arifin, S., & Sumar, W. T. (2018). *Analisis Kebijakan Pemerintah*.
- Carpenter, J. P., Shelton, C. C., Curcio, R., & Schroeder, S. (2021). The Education Influencer: New Possibilities and Challenges for Teachers in the Social Media World. In A. for the A. of C. in E. (AACE) (Ed.), *Society for Information Technology & Teacher Education International Conference* (pp. 1712–1721). <https://www.learntechlib.org/p/219338/>
- Donovan, M. S., Bransford, J. D., & Pellegrino, J. W. (1999). *How People Learn Bridging Research and Practice* (Issue 1). National Academies Press.
- Etzkowitz, H. (2008). *The Triple Helix: University–Industry–Government Innovation in Action*. Routledge.
- Fachmi, T., Latifa, R., Syahid, A. H., Kheryadi, Hidayatullah, & Rachmadtullah, R. (2019). School engagement predictors for Indonesian Islamic student. *Universal Journal of Educational Research*, 7(10), 2217–2226. <https://doi.org/10.13189/ujer.2019.071021>
- Habsah, S., Nasrudin, E., & Rosadi, A. (2021). Pelaksanaan Bimbingan Belajar oleh Orang Tua dalam Perkembangan Moral Spiritual Anak di Raudhatul Athfal. *Jurnal El-Audi*, 2(1), 20–36. <https://doi.org/10.56223/elaudi.v2i1.23>
- Hidayatullah, M. F. (2021). Quality Improvement Design At Islamic Schools Post-Covid-19 Pandemic in Elementary School and Integrated Early Childhood Education of Saleh Children, Malang City. *Jurnal Tatsqif*, 19(1), 81–97. <https://doi.org/10.20414/jtq.v19i1.3570>
- Husain, R., & Kaharu, A. (2020). Menghadapi Era Abad 21: Tantangan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 85. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.527>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. In *Kementerian Kesehatan republik Indonesia*. <https://doi.org/10.36805/bi.v2i1.301>
- Kimatu, J. N. (2016). Evolution of strategic interactions from the triple to quad helix innovation models for sustainable development in the era of globalization. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 0–6. <https://doi.org/10.1186/s13731-016-0044-x>
- Leydesdorff, L., & Etzkowitz, H. (2015). *Triple Helix of innovation : Introduction*. July.
- Ndeot, F. (2020). Potret PAUD di Desa Compang Ndejing. *Jurnal Pelita PAUD*, 4(2), 178–186. <https://doi.org/10.33222/pelitapaud.v4i2.977>
- Nurlatifah, N. N., Rachmawati, Y., & Yulindrasari, H. (2020). Pendidikan karakter anak usia dini pada keluarga tanpa ayah. *Edukid*, 17(1), 42–49. <https://doi.org/10.17509/edukid.v17i1.24213>
- Rachmawati, Y. (2020). Pengembangan Model Etnoparenting Indonesia pada Pengasuhan Anak. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1150–1162. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.706>
- Salman, I., & Widodo, A. (2020). Raudhatul Athfal Dalam Telaah Renstra Kemenag 2015-2019. *Jurnal Program Studi PGMI*, 7(September), 167–184.
- Sandseter, E. B. H., & Seland, M. (2016). Children’s experience of activities and participation and their subjective well-being in Norwegian early childhood education and care institutions. *Child Indicators Research*. <https://doi.org/10.1007/s12187-015-9349-8>
- Shyafary, D., Pristanti, H., & Cahyadi, D. (2021). *Implementation of the Role of Higher Education in the Vocational Sector in the Penta Helix Model*. <https://doi.org/10.4108/eai.18-11-2020.2311686>
- Suparlan, H. (2016). Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara dan Sumbangannya Bagi Pendidikan Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 25(1), 56–74. <https://doi.org/10.22146/jf.12614>

- Sutrisno, & Anitasaro, H. (2019). Strategi Penguatan Ekonomi Kreatif Dengan Identifikasi Penta Helix Di Kabupaten Bojonegoro Sutrisno , 2 Hening Anitasari Dosen Ekonomi Pembangunan Univeristas Bojonegoro Strategies for Strengthening Creative Economy with the Identification of Penta Helix. *JIABI*, 3(2), 89–108.
- Sylvina, V. (2014). *Perjalanan Kebijakan Konvergensi di Indonesia: Studi Formulasi Kebijakan Konvergensi Tahun 2010-2013*. Universitas Gadjah Mada.
- Tan, R. G. H. (2016). Early Childhood Care and Education in Five Asian Countries. In *The HEAD Foundation* (Vol. 80, Issue 4).
- The World Bank. (2022). *Prevalence of stunting, height for age (% of children under 5)*. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.STNT.ZS?end=2021&start=2021&view=bar>
- Tilaar, H. A. R., & Dwijowijoto, R. N. (2008). *Kebijakan pendidikan: pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik*. Pustaka Pelajar.
- TP2AK. (2020). *Apa yang dimaksud dengan konvergensi?* Kementerian Sekretariat Negara RI. <https://stunting.go.id/>